

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka diperlukan suatu pedoman dan arahan yang jelas sebagai acuan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Pedoman dan arahan tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis yang berisi antara lain tentang visi, misi, strategi serta rencana kerja beserta seluruh aspek yang berkaitan dengannya.

Rencana Strategis DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 disusun dengan memperhatikan kondisi dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman menjadi faktor yang selalu diperhitungkan.

Penyusunan Rencana Strategis DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 dilatarbelakangi oleh keinginan melaksanakan dan mengemban amanah yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dilaksanakan dengan ikut memenuhi tuntutan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan lima tahun ke depan. sesuai dengan peran dan fungsi DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sangat strategis, maka disusunlah Renstra DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017.

Dengan disusunnya rencana strategis ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Rencana Strategis ini selanjutnya menjadi acuan DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku aparatur penyelenggara pemerintah daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
- 5). Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 6). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
- 7) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8). Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 9). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 11). Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - 12). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - 13). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 - 14). Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 - 15). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 16). Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
 - 17). Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017; bermaksud untuk menjadi arah dan acuan bagi seluruh pegawai di lingkungan DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku aparatur penyelenggara pemerintah daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

1.3.2. Tujuan

Rencana Strategis Tahun 2012-2017 bertujuan untuk memantapkan terlaksananya program dan kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun ke depan sejalan dengan visi dan misi serta program dan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sesuai Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA TAHUN 2012-2017

Rencana Strategis DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menjelaskan pengertian ringkas Renstra DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 serta kedudukan dan keterkaitannya dengan RPJMD dan dokumen lainnya;

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RENSTRA

Menguraikan tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra baik yang bersifat nasional maupun daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Menguraikan dengan ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPPKAD

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DPPKAD

Memberikan informasi dan penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, struktur organisasi, serta uraian tugas.

2.2. SUMBER DAYA PADA DPPKAD

Memberikan gambaran umum tentang macam sumber daya yang dimiliki DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.

2.3. KINERJA PELAYANAN DPPKAD

Memberikan informasi capaian kinerja DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan sasaran dan ataupun target dalam Renstra Tahun 2007-2012.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DPPKAD

Menjelaskan secara umum tantangan dan peluang pengembangan DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada lima tahun mendatang.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DPPKAD

Menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Mengemukakan tugas dan fungsi DPPKAD yang terkait dengan visi dan misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. serta faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian visi dan misinya.

3.3. TELAAHAN RENSTRA TERHADAP SASARAN JANGKA MENENGAH

Mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPPKAD ditinjau dari sasaran jangka menengah.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pelayanan DPPKAD ditinjau dari rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Merupakan isu-isu strategis yang menjadi perhatian DPPKAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI

Berisikan rumusan pernyataan visi dan misi DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Berisikan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Menggambarkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017

BAB VI INDIKATOR KINERJA DPPKAD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Menjelaskan indikator kinerja DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DPPKAD

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Urusan wajib Pemerintahan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dengan tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah, maka perlu menata Susunan Organisasi dan Tata Kerja lembaga yang menangani hal tersebut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, DPPKAD Provinsi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/kota di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
3. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
4. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
5. Pelaksanaan urusan kesekretariat;

SEKRETARIAT DPPKAD

Tugas : memberikan pelayanan administrasi umum, perlengkapan dan rumah tangga, administrasi keuangan dan pembinaan kepegawaian kepada seluruh satuan kerja di lingkungan DPPKAD.

Fungsi :

1. Penyusunan program kerja tahunan dan pengkoordinasian penyusunan dan pengendalian program kerja sekretariat;
2. Pelaksanaan tata usaha pimpinan dan pengkoordinasian sub bagian dan staf yang berada di bawah sekretariat;
3. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
4. Pelaksanaan urusan keuangan;
5. Pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan;
6. Peyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
7. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;

8. Pembinaan staf;
9. Pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas sekretariat;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

A. SUB BAGIAN UMUM

Tugas : membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPPKAD dalam melaksanakan urusan administrasi umum, perlengkapan, hubungan masyarakat serta penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan.

B. SUB BAGIAN KEUANGAN

Tugas : membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPPKAD dalam melaksanakan penyusunan anggaran belanja, urusan pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban keuangan serta urusan perbendaharaan anggaran belanja DPPKAD.

C. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

Tugas : membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPPKAD dalam melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.

BIDANG PAJAK

Tugas : membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PPKD dalam melaksanakan berbagai pungutan dan kebijakan teknis pajak daerah, menyelesaikan sengketa pajak dan doleansi serta melaksanakan penyusunan program, pengendalian dan evaluasi pajak daerah.

A. Seksi Teknis Perpajakan

Tugas : membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak dalam melaksanakan penyelenggaraan pungutan pajak daerah.

B. Seksi Sengketa Pajak dan Doleansi

Tugas : membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak dalam melaksanakan penatausahaan dan pemberian pertimbangan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa pajak dan doleansi.

C. Seksi Penyusunan Program, pengendalian dan Evaluasi Pajak

Tugas : membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak dalam melaksanakan penyusunan rencana penerimaan,

pengkajian, pengendalian, pengelolaan serta melaksanakan evaluasi terhadap pajak daerah.

BIDANG RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN

Tugas : membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PPKAD dalam melaksanakan pembinaan teknis pungutan retribusi, penerimaan setoran laba, badan usaha milik negara (BUMN) / badan usaha milik daerah (BUMD), penerimaan dinas-dinas serta menyelenggarakan pembukuan dan laporan penerimaan pusat/bagi hasil, melaksanakan bimbingan pungutan penerimaan lain-lain.

A. Seksi Teknis Retribusi

Tugas : membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain dalam melaksanakan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan pungutan dan pemasukan retribusi daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah.

B. Seksi Sumbangan, Bagi Hasil dan Penerimaan lain-lain

Tugas : membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain dalam melaksanakan koordinasi administrasi pengelolaan sumbangan bagi hasil pajak dan bukan pajak, bimbingan teknis pungutan penerimaan lain-lain dan pembukuan setoran sumbangan dan pinjaman serta setoran laba badan usaha milik daerah (BUMD).

C. Seksi pengendalian dan Evaluasi

Tugas : membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain dalam melaksanakan pengkajian, pengendalian, pengelolaan serta evaluasi terhadap retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.

BIDANG ANGGARAN

Tugas: membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas PPKAD dalam menyiapkan petunjuk teknis dan pembinaan di bidang penganggaran dan penganggaran pada daerah bawahan, menghimpun/mengklasifikasi/meneliti dan menyiapkan bahan penyusunan APBD dan APBD Perubahan, mengolah hasil evaluasi APBD

dari departemen dalam negeri dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan dan pelaksanaan APBD.

A. Seksi Anggaran Belanja I

Tugas: membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Anggaran dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan penyusunan petunjuk teknis di bidang penganggaran.

B. Seksi Anggaran Belanja II

Tugas: membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Anggaran dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan penyusunan petunjuk teknis di bidang penganggaran.

C. Seksi Anggaran Pembinaan Daerah Bawahan

Tugas: membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Anggaran dalam menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan administrasi di bidang pembinaan anggaran daerah bawahan.

BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Tugas: membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PPKAD dalam menyiapkan bahan koordinasi, Petunjuk Teknis dan pembinaan di bidang akuntansi dan pelaporan serta menghimpun, mengelola administrasi dan melakukan pembukuan dan pelaporan terhadap setiap pendapatan dan pengeluaran APBD serta neraca daerah dan mengkoordinir pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

A. Seksi Pembukuan Anggaran Belanja.

Tugas: membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan pelaporan dalam menyiapkan bahan dan koordinasi serta petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi, penyusunan perhitungan APBD dan melakukan pembukuan anggaran belanja secara sistematis dan kronologis.

B. Seksi Pembukuan Anggaran Pendapatan

Tugas: membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan pelaporan dalam menyiapkan bahan dan koordinasi serta petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi, penyusunan perhitungan APBD dan melakukan pembukuan anggaran pendapatan secara sistematis dan kronologis.

C. Seksi Neraca Daerah

Tugas: membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan pelaporan dalam menyiapkan bahan dan koordinasi serta petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi dan penyusunan laporan neraca.

BIDANG PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI

Tugas : membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PPKAD dalam menyiapkan bahan koordinasi, petunjuk teknis dan melaksanakan pengujian kebenaran penagihan dan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) serta pembinaan terhadap administrasi keuangan kebendaharaan serta menyiapkan bahan pembinaan penelitian dan pemeriksaan terhadap realisasi pelaksanaan pengeluaran.

A. Seksi Perbendaharaan I

Tugas : membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perbendaharaan dan verifikasi dalam meneliti kelengkapan berkas surat perintah membayar (SPM) untuk penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D).

B. Seksi Perbendaharaan II

Tugas : membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perbendaharaan dan verifikasi dalam meneliti kelengkapan berkas surat perintah membayar (SPM) untuk penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D).

C. Seksi Verifikasi

Tugas : membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perbendaharaan dan verifikasi dalam menyiapkan bahan

pemeriksaan/penelitian terhadap realisasi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran.

BIDANG ASSET DAERAH

Tugas : membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PPKAD dalam menyiapkan bahan koordinasi, petunjuk teknis, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan kebutuhan dan inventarisasi, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan serta penyimpanan dan penghapusan.

A. Seksi Perlengkapan

Tugas : membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bidang asset daerah dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian di bidang pengadaan, distribusi dan pemeliharaan.

B. Seksi Penyimpanan dan Penghapusan

Tugas : membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bidang asset daerah dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan melaksanakan kegiatan penyimpanan dan penghapusan.

C. Seksi Perencanaan Kebutuhan Inventaris

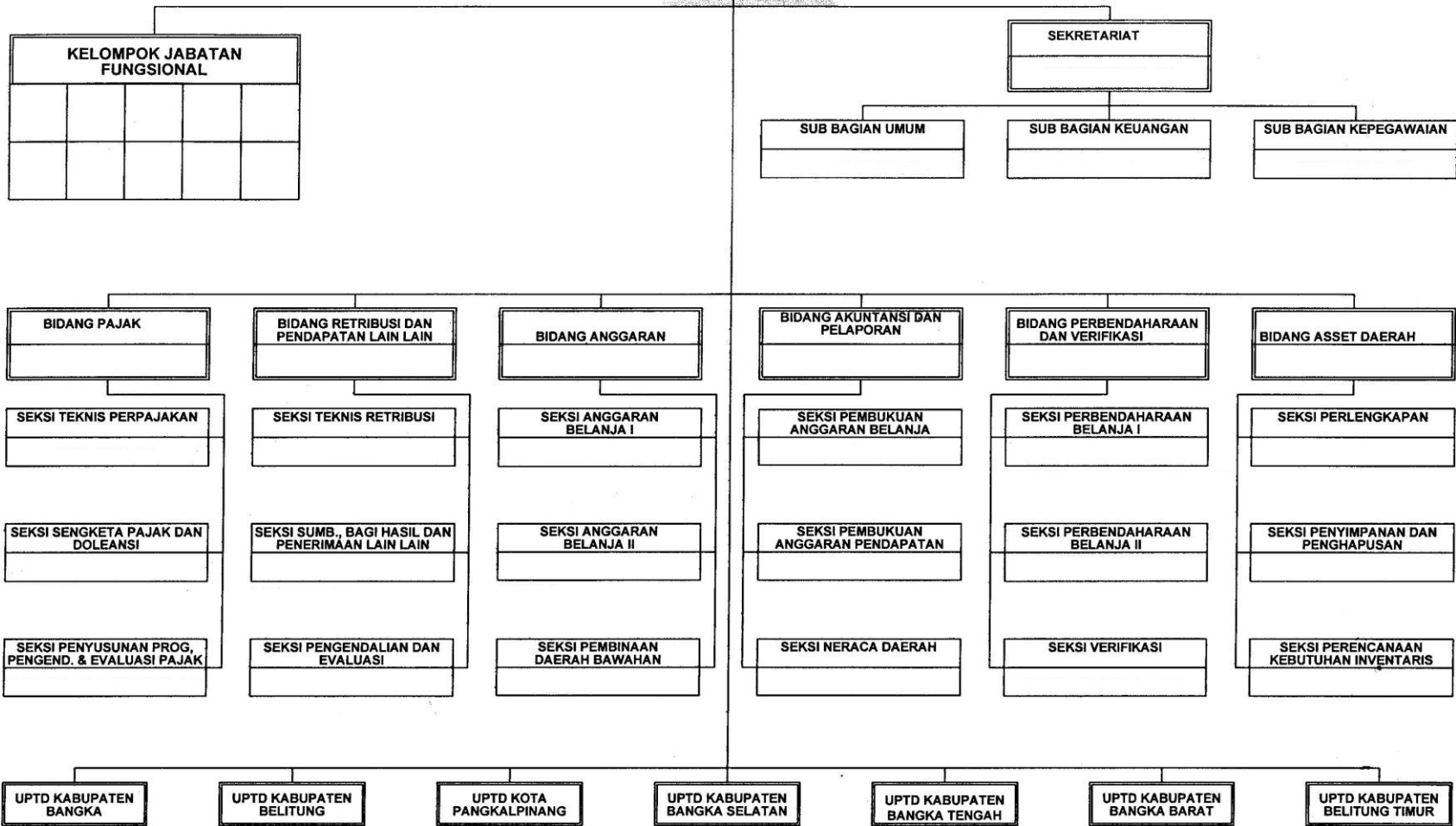
Tugas : membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bidang asset daerah dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, petunjuk teknis analisa rencana kebutuhan dan inventarisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008, struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

- a. 1 (satu) jabatan Kepala Dinas yang setara dengan jabatan eselon IIa;
- b. 1 (satu) jabatan Sekretaris Dinas yang setara dengan jabatan eselon IIIa;
- c. 6 (enam) jabatan Kepala Bidang yang setara dengan jabatan eselon IIIa;
- d. 7 (tujuh) jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang setara dengan jabatan eselon IIIa;

- e. 3 (tiga) jabatan Kepala Sub Bagian yang berada di Sekretariat dan 7 (tujuh) jabatan Kepala Sub Bagian yang berada di UPTD yang setara dengan jabatan eselon IVa;
- f. 32 (tiga puluh dua) jabatan Kepala Seksi yang berada di Bidang dan UPTD yang setara dengan jabatan eselon IVa;

Dibawah ini adalah Struktur Organisasi DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :



2.2. SUMBER DAYA PADA DPPKAD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada saat penyusunan Rencana Strategis Tahun 2012-2017 memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari (data berdasarkan rekapitulasi pegawai tahun 2011) :

Jumlah Pegawai DPPKAD Provinsi Kep. Bangka Belitung
Berdasarkan Unit Kerja dan Status Kepegawaian

No	UNIT KERJA	CPNS/PNS		THL		Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1	DPPKAD	65	56	12	4	77	60	137
2	UPT. BANGKA	16	15	5	2	21	17	38
3	UPT. BANGKA BARAT	8	3	6	1	14	4	18
4	UPT. BANGKA TENGAH	8	1	5	2	13	3	16
5	UPT .BANGKA SELATAN	10	1	6	1	16	2	18
6	UPT .PANGKALPINANG	18	15	5	2	23	17	40
7	UPT.BELITUNG	17	7	3	4	20	11	31
8	UPT.BELITUNG TIMUR	9	5	6	1	15	6	21
		151	103	48	17	199	120	319

Klasifikasi Pegawai DPPKAD
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Doktoral / S3	0	0	0
2	Pasca Sarjana / S2	7	0	7
3	Sarjana / S1	59	39	98
4	Diploma IV	1	0	1
5	Diploma III	20	32	52
6	Diploma I / II	0	0	0
7	SLTA	64	31	95
8	SLTP	0	1	1
9	SD	0	0	0

Klasifikasi Pegawai DPPKAD
Berdasarkan Eselonering

No	Eselon	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	12	-	12
3	Eselon IV	30	12	42
4	Non Eselon / Staf	108	91	199

Adapun kondisi Formasi Pegawai DPPKAD pada saat ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Formasi Pegawai DPPKAD

No	ESELON / STAF	FORMASI	TERISI	BELUM TERISI
1	Eselon II	1	1	0
2	Eselon III	14	12	2
3	Eselon IV	42	42	0
4	Staf	250	199	51
Jumlah		307	254	53

Sementara itu untuk sarana prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai aparatur penyelenggara pemerintah daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki asset yang tersebar di kantor DPPKAD dan 7 UPTD yang ada di kabupaten/kota yang secara umum dapat digambarkan seperti tabel dibawah ini :

Rekapitulasi Asset Tetap

NO	GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA/DALAM RIBUAN (Rp)	KET
1	01	01	Tanah	16	25.856.000	
2	02		Peralatan dan Mesin	3227	10.238.083.241.77	
		03	a.alat-alat angkutan	79	2.283.374.000	
		04	b.alat-alat bengkel dan alat ukur	10	307.966.000	
		05	c.alat-alat pertanian/peternakan	5	17.704.500	
		06	d.alat-alat kantor dan rumah tangga	3055	7.381.738.541.83	
		07	e. alat-alat studio dan komunikasi	77	247.300.199.94	
		09	f.alat-alat labor	1	-	

3	03	11	Gedung dan Bangunan	43	17.634.915.000	
			a.bangunan gedung	43	17.634.915.000	
4	04		Jaringan Irigasi dan Jaringan	45		
		13	a.jalan dan jembatan	8	5.423.428.753.02	
		15	b.instalasi	10	98.600.000	
		16	d.jaringan	27	472.537.003	
					4.852.291.750.02	
			Asset Tetap Lainnya	406		
5	05	19	a.hewan ternak dan tumbuhan	406	61.875.000	
					61.875.000	
			TOTAL	3.737	33.384.157.994.79	

2.3. KINERJA PELAYANAN DPPKAD

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tingkat capaian kinerja DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun 2007-2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Pendapatan																		
	Pendapatan Asli Daerah																		
	Pendapatan Pajak Daerah				189.739.841.759,00	221.432.548.432,00	240.315.388.662,00	265.592.101.274,00	335.981.579.920,94	173.275.828.727,00	259.510.276.421,00	215.031.167.221,00	295.667.259.362,00	418.338.201.160,95	91,32	117,20	89,48	111,32	124,51
	Pajak Kendaraan Bermotor				52.499.841.882,00	62.189.999.393,00	69.792.500.484,00	76.803.099.960,00	102.516.150.668,00	52.349.737.564,00	65.581.835.226,00	71.426.776.454,00	84.283.390.304,00	112.261.628.509,00	99,71	105,45	102,34	109,74	109,51
	Bea Balik Nama kendaraan Bermotor				70.239.999.882,00	69.242.592.498,00	74.105.722.008,00	75.625.435.355,00	127.385.740.989,00	40.497.899.648,00	87.101.922.392,00	54.910.005.338,00	104.756.998.049,00	173.063.338.240,00	57,66	125,79	74,10	138,52	135,86
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				64.999.999.995,00	87.999.956.541,00	94.269.166.170,00	110.732.565.959,00	104.684.688.263,94	77.894.952.243,00	103.993.437.003,00	87.381.677.543,00	105.211.466.479,00	130.283.011.080,00	119,84	118,17	92,69	95,01	124,45
	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan				2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.148.000.000,00	2.431.000.000,00	1.395.000.000,00	2.533.239.272,00	2.833.081.800,00	1.312.707.886,00	1.415.404.530,00	2.730.223.331,95	126,66	141,65	61,11	58,22	195,71
	Pendapatan Retribusi Daerah				698.900.000,00	1.486.442.500,00	2.221.007.500,00	2.487.092.000,00	1.801.603.000,00	1.504.794.907,00	3.000.947.464,10	4.043.047.679,10	2.628.024.060,73	3.565.501.452,21	215,31	201,89	182,04	105,67	197,91
	Retribusi Pelayanan Kesehatan				614.900.000,00	865.355.000,00	1.592.270.000,00	1.735.202.000,00	1.190.000.000,00	1.094.756.507,00	2.325.283.889,10	3.107.688.904,10	1.674.503.060,73	2.370.088.052,21	178,04	268,71	195,17	96,50	199,17
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				75.000.000,00	434.637.500,00	434.237.500,00	553.700.000,00	489.500.000,00	395.438.400,00	558.168.225,00	785.153.500,00	744.480.000,00	971.388.400,00	527,25	128,42	180,81	134,46	198,45
	Retribusi pelayanan Pelabuhan				9.000.000,00	6.000.000,00	2.500.000,00	6.857.000,00	2.500.000,00	14.600.000,00	2.000.000,00	-	4.000.000,00	2.100.000,00	162,22	33,33	0,00	58,33	84,00
	Retribusi Izin Trayek				11.750.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	21.550.000,00	20.000.000,00	16.050.000,00	39.917.000,00		183,40	117,65	94,41	199,59	
	Rekomendasi Izin Ketinggian Mendirikan Bangunan					2.500.000,00	2.000.000,00	5.143.000,00	2.000.000,00		2.250.000,00	750.000,00	5.000.000,00	3.250.000,00		90,00	37,50	97,22	162,50
	Izin Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara					2.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		-	-	200.000,00	-		0,00	0,00	13,33	0,00
	Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang				13.500.000,00	14.000.000,00	74.742.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00		16.329.350,00	23.118.975,00	71.565.000,00	146.146.000,00	120,96	165,14	95,75	182,68	
	Retribusi Pengambilan contoh dan Pengujian					150.000.000,00	157.500.000,00	92.948.000,00	16.103.000,00		75.366.000,00	106.336.300,00	112.226.000,00	32.612.000,00		50,24	67,52	120,74	202,52
	Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan				-	568.416.000,00	568.416.000,00	1.793.513.112,30	1.800.000.000,00	-	1.023.524.053,23	1.771.547.459,41	3.077.327.809,00	4.016.265.932,59		180,07	311,66	171,58	223,13
	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta					568.416.000,00	568.416.000,00	1.793.513.112,30	1.800.000.000,00		1.023.524.053,23	1.771.547.459,41	3.077.327.809,00	4.016.265.932,59		180,07	311,66	171,58	223,13
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				15.432.000.000,00	11.095.000.000,00	11.780.000.000,00	26.593.913.941,63	24.912.851.545,00	29.162.399.368,87	30.074.233.653,41	25.361.264.989,18	26.202.339.462,14	33.288.341.465,94		271,06	215,29	98,53	133,62
	Penerimaan Jasa Giro					6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	11.212.170.891,50	12.110.742.090,00	11.185.739.152,72	8.023.958.920,47	10.811.649.244,26	12.410.833.836,83	8.286.800.005,00		133,73	180,19	110,69	68,43
	Rekening Deposito pada Bank					5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	4.124.999.736,00	3.764.126.484,00	9.893.628.987,15	9.062.499.690,00	3.749.999.760,00	3.762.842.240,00	13.083.561.789,00		181,25	75,00	91,22	347,59
	Denda Bidang Pekerjaan Umum							654.343.865,99	648.356.085,00	482.772.992,00		54.135.748,00	298.530.318,16			0,00	8,27	46,04	
	Denda PKB							4.489.535.930,00	4.963.970.880,00	4.254.998.026,00	5.062.479.640,00	5.119.522.875,00	5.449.072.390,00	7.071.962.882,00	100,00	100,00	121,37	142,47	
	Denda BBN KB							198.691.020,00	180.472.950,00		388.523.150,00	163.325.600,00	191.065.000,00	358.221.775,00	100,00	100,00	96,16	198,49	
	Fasilitas Umum/Jasa Genset				95.000.000,00		80.000.000,00			60.045.799,00	81.237.533,00	10.519.625,00				85,51	13,15	0,00	0,00
	Fasilitas Sosial / Kujem						600.000.000,00	23.143.234,40	2.876.706,00			16.843.928,00	1.917.804,00			0,00	2,81	8,29	0,00
	Setoran Potongan Hutang (PT-Taspen)							30.914.206,40	58.919.850,00	28.895.300,00	3.550.000,00	5.739.200,00	47.477.800,00	12.065.344,00	100,00	100,00	153,58	20,48	
	Setoran Kontribusi Surat Keterangan Pajak Daerah							471.458.000,00	533.386.500,00	190.738.000,00	227.407.500,00	389.982.000,00	537.015.000,00	744.558.000,00	100,00	100,00	113,91	139,59	
	Denda Pekerjaan						100.000.000,00				3.693.643.448,94	610.917.105,27			100,00	610,92	0,00	0,00	
	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan							1.450.298.000,00	500.000.000,00	254.704.450,00	166.749.752,00	160.066.671,00	1.213.205.912,75	361.040.073,00	100,00	100,00	83,65	72,21	
	Pendapatan dari Pengembalian UUDP							3.637.048.977,34	2.000.000.000,00	1.551.906.369,00	3.019.559.553,00	4.205.884.180,65	1.333.810.720,46	2.413.986.840,64	100,00	100,00	36,67	120,70	
	Setoran Pengembalian KUPEM										344.624.466,00				100,00	0,00	0,00	0,00	
	Pendapatan dari TPTGR							256.992.560,00	150.000.000,00			116.814.800,00	1.156.645.510,10	657.614.439,14		100,00	450,07	438,41	
	Penerimaan Lain-lain (komisi,potongan bentuk lainnya)									1.258.970.293,00						0,00	0,00	0,00	
	Penerimaan Lain-lain (KP.Timah)							44.317.500,00					44.317.500,00			0,00	100,00	0,00	

	Pendapatan Transfer																		
	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan				511,474,100,000.00	547,477,250,000.00	506,009,742,257.00	645,422,399,290.00		545,937,870,505.00	557,876,172,790.00	519,286,071,865.00	700,510,364,139.00		106.74	101.90	102.62	108.54	
	Dana Bgi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak				98,399,660,000.00	93,919,410,000.00	87,126,509,257.00	139,991,284,290.00		135,066,330,505.00	104,318,328,790.00	100,571,963,865.00	201,039,549,139.00		137.26	111.07	115.43	143.61	
	Dana Bagi Hasil Pajak		16,350,000,000.00		34,250,840,000.00	40,345,840,000.00	43,906,095,284.00	52,365,735,594.00	-	41,571,828,155.00	44,007,940,457.00	52,057,506,986.00	55,995,923,193.00		121.37	109.08	118.57	106.99	
	Pajak Bumi dan Bangunan				22,850,780,000.00	26,575,974,000.00	23,517,511,218.00	34,915,651,545.00		23,682,705,832.00	28,392,141,062.00	35,489,462,397.00	39,559,170,505.00		103.64	106.83	150.91	113.30	
	Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan				3,012,110,000.00	3,741,929,000.00	2,250,709,649.00	-		1,630,108,797.00	1,561,854,676.00	2,140,764,918.00	1,192,800.00		54.12	41.74	95.12	100.00	
	PPh Orang Pribadi (termasuk Pph pasal 21/25)				8,387,950,000.00	10,027,937,000.00	18,137,874,417.00	17,450,084,049.00		16,259,013,526.00	14,053,944,719.00	14,427,279,671.00	16,435,559,888.00		193.84	140.15	79.54	94.19	
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA			24,078,000,000.00	64,148,820,000.00	53,573,570,000.00	43,220,413,973.00	87,625,548,696.00	-	93,494,502,350.00	60,310,388,333.00	48,514,456,879.00	145,043,625,946.00		145.75	112.57	112.25	165.53	
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Hutan			24,078,000,000.00	-	-	137,160,473.00	50,788,811.00	-	61,074,648.00	107,501,427.00	156,605,194.00	18,883,107.00		100.00	100.00	114.18	37.18	
	Iuran Hak Pengusaha Huta (IHPH)				-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.00	0.00	0.00	0.00	
	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				-	-	137,160,473.00	50,788,811.00		61,074,648.00	107,501,427.00	156,605,194.00	18,883,107.00		100.00	100.00	114.18	37.18	
	Pertambangan				64,148,820,000.00	53,573,570,000.00	43,083,253,500.00	87,574,759,885.00	-	93,433,427,702.00	60,202,886,906.00	48,357,851,685.00	145,024,742,839.00		145.65	112.37	112.24	165.60	
	Iuran Tetap (Land Rent)				10,148,820,000.00	10,148,820,000.00	1,999,431,100.00	2,395,477,300.00		3,920,701,497.00	1,993,832,970.00	1,608,276,825.00	2,478,818,636.00		38.63	19.65	80.44	103.48	
	Iuran Eksploitasi (Royalti)				42,000,000,000.00	43,412,750,000.00	36,655,641,400.00	75,733,676,825.00		75,540,184,273.00	52,134,276,015.00	36,854,471,689.00	131,711,738,877.00		179.86	120.09	100.54	173.91	
	Bagi Hasil SDA Migas				12,000,000,000.00	12,000,000.00	4,428,181,000.00	9,445,605,760.00		13,972,541,932.00	6,074,777,921.00	9,895,103,171.00	10,834,185,326.00		116.44	50623.15	223.46	114.70	
	Dana Alokasi Umum			319,357,000,000.00	391,045,440,000.00	407,994,840,000.00	410,811,433,000.00	481,589,915,000.00	319,357,000,000.00	391,045,440,000.00	407,994,844,000.00	410,642,308,000.00	481,589,915,000.00		100.00	100.00	99.96	100.00	
	Dana Alokasi Khusus			-	22,029,000,000.00	45,563,000,000.00	8,071,800,000.00	23,841,200,000.00	-	19,826,100,000.00	45,563,000,000.00	8,071,800,000.00	17,880,900,000.00		90.00	100.00	100.00	75.00	
	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya							33,778,571,000.00									0.00	0.00	0.00
	Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus			-	-	-	1,000,000,000.00	33,778,571,000.00	-	-	169,125,000.00	614,512,500.00	33,778,571,000.00		100.00	61.45	100.00		
	Dana Tambahan Penghasilan dan Tunjangan Profesi Guru PNSD						-	-				164,512,500.00			0.00	100.00	0.00		
	Dana Penyesuaian DPIPD Bidang SIPKD						1,000,000,000.00					450,000,000.00			0.00	45.00	0.00		
	Dana Penyesuaian DPIPD Bidang Infrastruktur Jalan							24,750,000,000.00					24,750,000,000.00		0.00	0.00	100.00		
	Dana Penyesuaian PPID							9,028,571,000.00					9,028,571,000.00		0.00	0.00	100.00		
															0.00	0.00	0.00		
	Transfer Pemerintah Provinsi														0.00	0.00	0.00		
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.00	0.00	0.00		
	Lain-lain Pendapatan yang Sah							50,000,000,000.00							0.00	0.00	0.00		
	Pendapatan Hibah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.00	0.00	0.00		
	Pendapatan Lainnya			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.00	0.00	0.00		
	Sumbangan Pihak ke Tiga			-	-	-	-	50,000,000,000.00	-	-	-	-	-		0.00	0.00	0.00		

Tabel 2.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	342,000,000.00	348,000,000.00	492,000,000.00	200,000,000.00	212,000,000.00	28,236,300.00	68,623,446.00	68,985,113.00	41,228,873.48	60,721,605.00	8.26	19.72	14.02	20.61	28.64	318,800,000.00	53,559,067.50
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	182,400,000.00	142,200,000.00	169,200,000.00	176,400,000.00	179,400,000.00	91,800,000.00	133,350,000.00	160,800,000.00	163,350,000.00	166,250,000.00	50.33	93.78	95.04	92.60	92.67	169,920,000.00	143,110,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	528,000,000.00	408,000,000.00	384,000,000.00	408,000,000.00	408,000,000.00	130,160,825.00	199,944,310.00	254,247,140.00	323,270,868.00	287,916,108.00	24.65	49.01	66.21	79.23	70.57	427,200,000.00	239,107,850.20
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	498,677,200.00	802,680,000.00	924,020,000.00	924,020,000.00	908,000,000.00	398,468,350.00	698,881,400.00	704,478,430.00	676,670,500.00	827,173,734.00	79.91	87.07	76.24	73.23	91.10	811,479,440.00	661,134,482.80
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	818,240,000.00	1,039,312,000.00	1,124,120,000.00	1,017,000,000.00	942,600,000.00	40,235,000.00	142,084,750.00	533,259,000.00	488,435,728.00	822,770,550.00	4.92	13.67	47.44	48.03	87.29	988,254,400.00	405,357,005.60
Penyediaan Alat Tulis Kantor	1,180,544,300.00	1,247,560,000.00	1,225,305,376.00	850,000,000.00	850,600,000.00	467,922,500.00	736,335,500.00	1,194,798,900.00	847,398,550.00	842,642,500.00	39.64	59.02	97.51	99.69	99.06	1,070,801,935.20	817,819,590.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,063,116,200.00	1,337,782,000.00	1,410,451,060.00	1,072,550,000.00	1,132,600,000.00	232,840,250.00	557,700,950.00	819,425,849.00	975,607,920.00	1,055,896,213.00	21.90	41.69	58.10	90.96	93.23	1,203,299,852.00	728,294,236.40
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	82,500,000.00	106,000,000.00	126,620,000.00	107,000,000.00	120,000,000.00	15,654,900.00	106,490,000.00	120,913,000.00	41,380,440.00	81,549,146.00	18.98	100.46	95.49	38.67	67.96	108,424,000.00	73,197,497.20
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140,681,240.00	-	-	8,490,000.00	-	108,800,000.00	-	-	8,490,000.00	-	77.34	-	-	100.00	-	29,834,248.00	23,458,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33,600,000.00	62,400,000.00	50,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	13,835,000.00	30,775,500.00	41,582,000.00	34,437,000.00	34,709,000.00	41.18	49.32	83.16	98.39	99.17	43,200,000.00	31,067,700.00
Penyediaan Makanan dan Minuman	44,550,000.00	157,812,000.00	274,200,000.00	29,720,000.00	93,200,000.00	15,986,500.00	44,507,000.00	95,030,750.00	14,683,000.00	22,811,850.00	35.88	28.20	34.66	49.40	24.48	119,896,400.00	38,603,820.00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	514,600,000.00	652,200,000.00	702,600,000.00	800,000,000.00	700,000,000.00	79,146,200.00	363,661,600.00	700,758,300.00	761,789,400.00	523,300,400.00	15.38	55.76	99.74	95.22	74.76	673,880,000.00	485,731,180.00
Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Adm Perkantoran	816,000,000.00	260,000,000.00	26,000,000.00	13,000,000.00	16,900,000.00	586,800,000.00	25,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	16,900,000.00	71.91	9.62	50.00	100.00	100.00	226,380,000.00	130,940,000.00
Kunjungan Kerja ke Kab/kota	15,960,000.00	-	-	-	-	15,960,000.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	3,192,000.00	3,192,000.00
Penyediaan Jasa Penggajian SKPD Pemprov	-	-	-	-	54,510,000.00	-	-	-	-	45,910,000.00	-	-	-	-	84.22	10,902,000.00	9,182,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	0.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	61,195,000.00	-	-	-	-	54,836,900.00	-	-	-	-	89.61	-	-	-	-	12,239,000.00	10,967,380.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	319,230,000.00	-	-	-	-	266,861,000.00	-	-	-	-	83.60	-	-	-	-	63,846,000.00	53,372,200.00
Pengadaan Meubelair	180,230,000.00	-	-	-	-	115,401,000.00	-	-	-	-	64.03	-	-	-	-	36,046,000.00	23,080,200.00

Pengadaan Prasarana Kelengkapan Gedung Kantor	262.200.000,00	-	-	-	-	266.861.000,00	-	-	-	-	101,78	-	-	-	-	52.440.000,00	53.372.200,00
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	446.021.000,00	528.644.000,00	356.426.000,00	490.458.000,00	1.185.600.000,00	281.889.080,00	299.075.000,00	353.884.671,55	275.571.489,00	745.845.774,00	63,20	56,57	99,29	56,19	62,91	601.429.800,00	391.253.202,91
Pemeliharaan Rutin/berkala Kend.Dinas	436.870.000,00	735.075.000,00	653.075.000,00	625.000.008,00	852.625.000,00	227.619.500,00	577.114.050,00	605.543.545,00	463.848.970,00	543.305.000,00	52,10	78,51	92,72	74,22	63,72	660.529.001,60	483.486.213,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	224.265.592,00	107.970.000,00	-	51.200.000,00	50.000.000,00	99.946.000,00	82.769.200,00	-	31.650.000,00	34.490.000,00	44,57	76,66	-	61,82	68,98	86.687.118,40	49.771.040,00
Pengadaan Rehabilitasi Kantor	379.850.000,00	-	-	-	-	379.850.000,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	75.970.000,00	75.970.000,00
Pengadaan Kend.Dinas/operasional	-	184.625.000,00	-	-	-	-	179.721.000,00	-	-	-	-	97,34	-	-	-	36.925.000,00	35.944.200,00
Pembangunan Garasi Kend.Dinas Dipenda	-	249.595.000,00	-	-	-	-	4.914.000,00	-	-	-	-	1,97	-	-	-	49.919.000,00	982.800,00
Pemasangan Konblok dan Penimbunan Tanahy Kantor UPT Kab.Betim	-	361.808.517,93	-	-	-	-	358.300.000,00	-	-	-	-	99,03	-	-	-	72.361.703,59	71.660.000,00
Pengadaan Pot dan Tanaman Hias Kantor Dipenda	-	66.000.000,00	-	-	-	-	65.175.000,00	-	-	-	-	98,75	-	-	-	13.200.000,00	13.035.000,00
Pengadaan Instalasi air tanam 6 UPT dan Kantor Dipenda	-	78.000.000,00	-	-	-	-	76.524.140,00	-	-	-	-	98,11	-	-	-	15.600.000,00	15.304.828,00
Pembuatan Flatduicker pada 4 Kantor UPT DPPKAD	-	132.750.000,00	-	-	-	-	117.850.000,00	-	-	-	-	88,78	-	-	-	26.550.000,00	23.570.000,00
Pembuatan Vertical Blind/gordyn	-	400.990.000,00	-	-	-	-	248.121.500,00	-	-	-	-	61,88	-	-	-	80.198.000,00	49.624.300,00
Penyekatan Ruang Kantor DPPKAD	-	36.660.000,00	-	-	-	-	35.808.000,00	-	-	-	-	97,68	-	-	-	7.332.000,00	7.161.600,00
Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	214.227.500,00	-	-	-	-	198.180.000,00	-	-	-	-	92,51	-	-	-	42.845.500,00	39.636.000,00
Pengadaan Pemasangan Jaringan Listrik	-	179.131.260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.826.252,00	0,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	172.340.000,00	-	-	345.819.000,00	-	160.601.000,00	-	-	329.901.600,00	-	93,19	-	-	95,40	103.631.800,00	98.100.520,00
Pengadaan Komputer	-	567.319.500,00	-	-	-	-	492.245.000,00	-	-	-	-	86,77	-	-	-	113.463.900,00	98.449.000,00
Pengadaan Peralatan Kantor (mesin foto copy)	-	491.650.000,00	-	-	-	-	484.662.000,00	-	-	-	-	98,58	-	-	-	98.330.000,00	96.932.400,00
Pengadaan Alat-alat Studio	-	98.259.813,00	-	-	-	-	83.830.000,00	-	-	-	-	85,31	-	-	-	19.651.962,60	16.766.000,00
Pengadaan Mesin Rumput	-	13.621.000,00	-	-	-	-	11.590.000,00	-	-	-	-	85,09	-	-	-	2.724.200,00	2.318.000,00
Pengadaan Meubelair (samsat pemekaran)	-	388.204.590,00	-	-	-	-	359.474.000,00	-	-	-	-	92,60	-	-	-	77.640.918,00	71.894.800,00
Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor	-	394.715.802,00	-	-	-	-	354.163.000,00	-	-	-	-	89,73	-	-	-	78.943.160,40	70.832.600,00
Pengadaan Rehabilitasi kantor	-	379.850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.970.000,00	0,00
DED Gedung Samsat kota Pangkalpinang	-	-	300.000.000,00	-	-	-	-	200.499.400,00	-	-	-	-	66,83	-	-	60.000.000,00	40.099.880,00
Pembangunan gedung Kantor UPT/Samsat Pk.Pinang	-	-	-	7.487.629.000,00	-	-	-	-	7.385.907.370,00	-	-	-	-	98,64	-	1.497.525.800,00	1.477.181.474,00
DED Gedung Samsat kabupaten Belitung	-	-	-	-	212.095.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.419.000,00	0,00
Pengadaan Server & storage service sistem aplikasi samsat	-	-	-	-	163.980.000,00	-	-	-	-	159.441.600,00	-	-	-	-	97,23	32.796.000,00	31.888.320,00
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	-	-	566.761.425,00	-	311.371.750,00	-	-	563.123.925,00	-	278.674.500,00	-	-	99,36	-	89,50	175.626.635,00	168.359.685,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	0,00
Pengadaan mesin absensi sidik jari	-	32.944.500,00	-	-	-	-	30.444.500,00	-	-	-	-	92,41	-	-	-	6.588.900,00	6.088.900,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	-	-	-	224.830.000,00	-	-	-	-	208.215.000,00	-	-	-	-	92,61	44.966.000,00	41.643.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur												-	-	-	-	-	-	0.00	
Rapat koordinasi teknis retribusi	-	29,397,500.00	-	-	-	-	26,645,000.00	-	-	-	-	90.64	-	-	-	-	-	5,879,500.00	5,329,000.00
Rapat koordinasi intensifikasi PBB, BPHTB, dan PPh	-	70,256,300.00	-	-	-	-	58,506,300.00	-	-	-	-	83.28	-	-	-	-	-	14,051,260.00	11,701,260.00
Rapat forum kerjasama Dinas PPKAD Provinsi dan Kabupaten/Kota	-	-	73,220,000.00	-	-	-	-	64,620,000.00	-	-	-	-	88.25	-	-	-	-	14,644,000.00	12,924,000.00
Rapat koordinasi intensifikasi PBB, BPHTB, dan PPh	-	-	73,220,000.00	92,592,000.00	-	-	-	64,620,000.00	85,345,000.00	-	-	-	88.25	92.17	-	-	-	33,162,400.00	29,993,000.00
Bimbingan Teknis implementasi peraturan Perundang-undangan	-	-	-	199,650,000.00	184,975,000.00	-	-	-	25,065,000.00	145,602,800.00	-	-	-	12.55	78.71	-	-	76,925,000.00	34,133,560.00
Pembinaan administrasi umum kepegawaian dan keuangan di UPT DPPKAD	-	-	-	-	75,000,000.00	-	-	-	-	67,690,000.00	-	-	-	-	90.25	-	-	15,000,000.00	13,538,000.00
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	400,000,000.00	-	-	-	-	339,319,000.00	-	-	-	-	84.83	-	-	-	-	-	-	80,000,000.00	67,863,800.00
Rakor Tim intensifikasi PBB & BPHTB, PPh	-	-	-	-	155,926,500.00	-	-	-	-	134,259,550.00	-	-	-	-	86.10	-	-	31,185,300.00	26,851,910.00
Rapat forum kerjasama Dispenda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	40,750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,150,000.00	0.00
Rapat Koordinasi teknis retribusi	23,500,000.00	-	-	-	-	23,090,000.00	-	-	-	-	98.26	-	-	-	-	-	-	4,700,000.00	4,618,000.00
Rapat koordinasi intensifikasi PBB, BPHTB, dan PPh	80,865,000.00	-	-	-	-	80,640,000.00	-	-	-	-	99.72	-	-	-	-	-	-	16,173,000.00	16,128,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan												-	-	-	-	-	-	-	0.00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	-	107,977,100.00	-	100,000,000.00	61,179,700.00	-	36,350,600.00	-	37,455,000.00	37,315,600.00	-	33.67	-	37.46	60.99	-	-	53,831,360.00	22,224,240.00
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota												-	-	-	-	-	-	-	0.00
Evaluasi raperda APBD Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang perhitungan APBD	-	55,500,000.00	-	-	-	-	20,282,000.00	-	-	-	-	36.54	-	-	-	-	-	11,100,000.00	4,056,400.00
Evaluasi raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang APBD	-	200,000,000.00	200,000,000.00	150,000,000.00	-	-	90,707,000.00	142,219,900.00	120,521,600.00	-	-	45.35	71.11	80.35	-	-	-	110,000,000.00	70,689,700.00
Evaluasi raperda Kab/Kota tentang APBD dan pertanggungjawaban realisasi APBD kab/kota	-	-	-	-	250,000,000.00	-	-	-	-	137,175,000.00	-	-	-	-	54.87	-	-	50,000,000.00	27,435,000.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah												-	-	-	-	-	-	-	0.00
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	450,000,000.00	422,330,000.00	-	-	-	4,742,000.00	70,480,000.00	-	-	-	1.05	16.69	-	-	-	-	-	174,466,000.00	15,044,400.00
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	-	894,930,000.00	845,290,000.00	705,290,000.00	891,150,000.00	-	634,282,900.00	691,473,200.00	522,636,000.00	688,543,400.00	-	70.88	81.80	74.10	77.26	-	-	667,332,000.00	507,387,100.00
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	-	299,209,200.00	212,000,000.00	200,000,000.00	191,497,900.00	-	241,246,400.00	147,271,900.00	127,049,500.00	147,439,100.00	-	80.63	69.47	63.52	76.99	-	-	180,541,420.00	132,601,380.00
Penyusunan system informasi manajemen keuangan daerah	-	735,325,000.00	-	-	-	-	255,566,775.00	-	-	-	-	34.76	-	-	-	-	-	147,065,000.00	51,113,355.00

Bimbingan Teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	-	75,265,000.00	-	-	-	-	54,190,000.00	-	-	-	-	72.00	-	-	-	15,053,000.00	10,838,000.00
Penyusunan raperda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	-	473,399,025.00	-	-	-	-	234,179,200.00	-	-	-	-	49.47	-	-	-	94,679,805.00	46,835,840.00
Rapat Koordinasi dan pembinaan bendahara pengeluaran PPK-SKPD se-Prov. Kep. Babel	-	268,200,000.00	-	-	-	-	47,855,200.00	-	-	-	-	17.84	-	-	-	53,640,000.00	9,571,040.00
Penyusunan petunjuk (juklak) APBD Tahun 2008	-	78,747,500.00	-	-	-	-	74,819,707.00	-	-	-	-	95.01	-	-	-	15,749,500.00	14,963,941.40
Penyediaan jasa penatausahaan keuangan daerah	-	1,423,585,000.00	-	-	-	-	417,045,254.00	-	-	-	-	29.30	-	-	-	284,717,000.00	83,409,050.80
Sosialisasi perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	-	150,000,000.00	-	-	-	-	93,975,300.00	-	-	-	-	62.65	-	-	-	30,000,000.00	18,795,060.00
Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	-	-	200,000,000.00	-	-	-	-	72,291,600.00	-	-	-	-	36.15	-	-	40,000,000.00	14,458,320.00
Inventarisasi aset daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung th.2006	-	-	108,646,400.00	-	-	-	-	101,811,400.00	-	-	-	-	93.71	-	-	21,729,280.00	20,362,280.00
Sosialisasi peningkatan pengelolaan aset daerah	-	-	78,445,550.00	-	-	-	-	63,625,050.00	-	-	-	-	81.11	-	-	15,689,110.00	12,725,010.00
Pendampingan pengembangan aplikasi SIPKD DAB regional SKD	-	-	222,300,000.00	106,527,000.00	-	-	-	39,248,300.00	29,827,400.00	-	-	-	17.66	28.00	-	65,765,400.00	13,815,140.00
Penghapusan barang-barang inventaris serta penyertaan modal Provinsi	-	-	66,325,600.00	-	-	-	-	52,786,400.00	-	-	-	-	79.59	-	-	13,265,120.00	10,557,280.00
Pembinaan bendahara pengeluaran dan PPK SKPD	-	-	99,150,000.00	112,647,500.00	-	-	-	53,840,000.00	81,682,900.00	-	-	-	54.30	72.51	-	42,359,500.00	27,104,580.00
Penyusunan dan penghapusan barang-barang inventaris	-	-	-	44,806,000.00	-	-	-	-	42,521,800.00	-	-	-	-	94.90	-	8,961,200.00	8,504,360.00
Penyusunan harga satuan barang dan jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	128,180,000.00	-	-	-	-	67,030,000.00	-	-	-	-	52.29	-	25,636,000.00	13,406,000.00
Pengadaan peralatan implementasi SIPKD	-	-	-	1,070,353,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214,070,600.00	0.00
Sosialisasi Pergub Kepulauan Bangka Belitung tentang kebijakan akuntansi	-	-	-	55,180,000.00	-	-	-	-	25,142,600.00	-	-	-	-	45.56	-	11,036,000.00	5,028,520.00
Operasional aplikasi SIPKD dan regional SKD	-	-	-	-	292,082,200.00	-	-	-	-	143,537,500.00	-	-	-	-	49.14	58,416,440.00	28,707,500.00
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	-	-	-	400,000,000.00	-	-	-	-	232,947,800.00	-	-	-	-	58.24	-	80,000,000.00	46,589,560.00
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	-	-	-	-	400,000,000.00	-	-	-	-	255,676,000.00	-	-	-	-	63.92	80,000,000.00	51,135,200.00
Pembinaan bendahara pengeluaran dan PPK SKPD	-	-	-	-	162,984,000.00	-	-	-	-	68,389,200.00	-	-	-	-	41.96	32,596,800.00	13,677,840.00
Penyusunan dan penghapusan barang-barang inventaris	-	-	-	-	70,018,100.00	-	-	-	-	48,741,700.00	-	-	-	-	69.61	14,003,620.00	9,748,340.00

Secara garis besar pencapaian kinerja pada DPPKAD dapat dilihat dari :

1. Tercapainya target pajak daerah yang telah ditetapkan
2. Penyampaian APBD yang tepat waktu.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DPPKAD

Dengan adanya perubahan ekonomi, sosial budaya, teknologi dan pengetahuan yang berkembang dimasyarakat dewasa ini, DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dihadapkan dengan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dengan kondisi sebagai berikut :

2.4.1. Kekuatan (*Strength*)

Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung keberadaan DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 2) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.4.2. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Terbatasnya jumlah Pegawai yang ada pada DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 2) Masih perlunya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah yang ada di DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah;
- 4) Optimalisasi penerapan sistem informasi keuangan daerah berupa sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah.

2.4.3. Peluang (*Opportunity*)

- 1) Adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kegunaan dari pajak yang mereka bayar untuk pembangunan daerah provinsi kepulauan bangka belitung;
- 2) Kesadaran aparatur yang ada di DPPKAD untuk meningkatkan kompetensinya dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;

- 3) Tersedianya dana untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang aparatur dalam mengintensifikasi dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah.

2.4.4. Tantangan (*Threats*)

- 1) Korupsi, Kolusi dan Nepotisme masih menjadi isu nasional di kalangan aparatur pemerintah;
- 2) Masih Adanya masyarakat yang belum mengerti akan pentingnya pendapatan dari pajak daerah untuk pembangunan di provinsi kepulauan bangka belitung;
- 3) Keterbatasan kemampuan aparatur di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- 4) Kondisi perekonomian global.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsi masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam pelayanan DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan dalam pelayanan DPPKAD antara lain adalah :

1. Masalah yang bersifat internal
 - a. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumberdaya manusia di DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
 - b. Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas.
 - c. Belum maksimalnya tugas-tugas internal. Hal ini dipengaruhi oleh standar dan pedoman kerja yang relatif masih terbatas dan belum terisinya kelompok jabatan struktural.

2. Masalah yang bersifat eksternal
 - a. Belum dipahami secara baik tentang proses dan mekanisme penganggaran dan pengelolaan keuangan oleh setiap SKPD yang ada di pemerintahan provinsi kepulauan bangka belitung.
 - b. Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur DPPKAD di dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
 - c. Ketersediaan Anggaran didalam memfasilitasi program kerja DPPKAD

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPPKAD di dalam memberikan pelayanan antara lain :

1. Perlu ada keyakinan akan pentingnya tugas pokok dan fungsi DPPKAD yang pasti dan jelas di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Kepemimpinan yang memiliki kemampuan serta kompetensi yang mendukung dibidang peendapatan,pengelolaan keuangan dan asset daerah.
3. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan asset daerah.
4. Komitmen bersama antaran pimpinan dan seluruh staf DPPKAD guna mencapai misi dan misi DPPKAD.
5. Ketersediaan anggaran dalam mendukung program/kegiatan dalam peningkatan penerimaan pendapatan,pengelolaan keuangan dan asset daerah.
6. Komitmen bersama seluruh SKPD untuk membangun pemerintah yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3.2. TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Memperhatikan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan tahun 2012- 2017 adalah:

- I. Ekonomi dan SDA
- II. Lingkungan Hidup;
- III. Sarana dan Prasarana;
- IV. SDM dan Kependudukan;
- V. Pemerintahan; dan
- VI. Sosial, Budaya dan Politik

Pada tahap pembangunan lima tahun kedua, pemerintah diharapkan lebih memfokuskan perhatiannya pada kebijakan dan upaya konkrit untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Sesuai dengan visinya, **“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan Berdaya Saing Berbasis Potensi Lokal Melalui Pengembangan Sinergitas dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan “** maka perhatian utama diberikan pada bidang-bidang yang akan berdampak kuat dan luas pada pembangunan agri-bahari, yaitu perkebunan, perikanan dan pariwisata. Di samping itu, pada tahap ini juga sudah mulai dirintis pengembangan industri pengolahan yang memanfaatkan hasil produk lokal dari bidang perkebunan dan perikanan.

Strategi pembangunan yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan perhatian khusus pada percepatan pembangunan dan pertumbuhan sentra-sentra ekonomi, wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh (zona pertumbuhan), sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi. Kerjasama pengembangan ekonomi harus dirintis tidak saja sebatas antar kabupaten/kota dalam provinsi, tetapi juga dengan daerah-daerah lain di luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam proses pembangunan ekonomi ini, pemerintah hendaknya tetap menerapkan kebijakan dan upaya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Di samping itu, penyelesaian masalah kerusakan lingkungan hidup diyakini tidak dapat diselesaikan dalam 5 tahun pertama dan karenanya kebijakan dan upaya konkrit tersebut tetap harus diupayakan pada lima tahun kedua dan seterusnya.

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak terlepas dari visi dan misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian visi dan misinya.

Rencana Strategis Tahun 2012-2017 DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan prinsip-prinsip untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Di dalam upaya mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih terdapat faktor-faktor penghambat antara lain dimungkinkan adanya unsur tekanan politis dan kepentingan golongan atau individu di dalam visi dan misi yang ditetapkan.

Sedangkan faktor pendukung yang sangat berarti bagi DPPKAD di dalam upaya mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih berupa kepercayaan publik atau masyarakat akan pentingnya peranan dan fungsi dari Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

3.3. TELAHAH RENSTRA TERHADAP SASARAN JANGKA MENENGAH

Rencana Strategis DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 disusun dengan sasaran jangka menengah antara lain :

1. Sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi dan sistematis sehingga mempermudah didalam memperoleh laporan keuangan yang baik dan benar.
2. Sistem pengolahan data asset yang tersistematis dan up to date yang dapat diyakini kebenarannya.
3. Ketersediaan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
4. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pajak daerah.

3.4. TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dalam rangka mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah maka DPPKAD berfungsi didalam perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah maupun perizinan dan pelaksanaan umum lintas kabupaten/kota dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah. Sehingga kedepan diharapkan sinergitas perencanaan penganggaran dengan kegiatan pembangunan akan semakin tercapai.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses pencapaian prioritas pembangunan yang telah

tertuang didalam RPJPD 2005-2025. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, tantangan serta potensi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah , maka isu strategis yang berkembang pada saat ini serta berpengaruh terhadap tugas-tugas DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu :

1. Dokumen perencanaan belum memenuhi substansi perencanaan yang baik;
2. Sumber Daya Aparatur ;
3. Belum dimanfaatkannya secara optimal teknologi informasi dalam menunjang terciptanya sitem informasi keuangan yang transparan dan akuntable.;
4. Standar pelayanan minimal untuk peningkatan kualitas palayanan publik secara sinergis.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI

4.1.1. VISI DPPKAD

Sebagai SKPD yang ingin tetap eksis, antisipatif dan inovatif di masa depan, DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai cara pandang ke depan yang dituangkan dalam Visi sebagai berikut :

“ Terwujudnya Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang Optimal, Akuntable dan Akurat.”

4.1.2. MISI DPPKAD

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dibidang perpajakan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
2. Mewujudkan kebijakan pendapatan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai alat untuk melakukan fungsi, alokasi, distribusi dan stabilitasi.
3. Meningkatkan efektifitas manajemen dan pengelolaan keuangan daerah.
4. Meningkatkan keselarasan antar pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .
5. Meningkatkan penyediaan administrasi asset yang akurat.
6. Meningkatkan pelayanan publik di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
7. Mewujudkan sistem informasi yang teritegrasi.
8. Meningkatkan penerimaan daerah dengan melalui peningkatan kualitas pelayanan yang prima pada masyarakat, khususnya masyarakat wajib pajak (WP).
9. Meningkatkan penyediaan prasarana, guna menunjang intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
10. Mewujudkan data dan informasi perpajakan yang konfrehensif, akurat, reliable, transparan dan dapat di akses oleh masyarakat.
11. Mewujudkan komunikasi, pengiriman data dan transaksi secara cepat, transparan, akuntable dan realible, antara DPPKAD dengan wajib pajak, juga antara DPPKAD dengan unit kerja sejenis di setiap kabupaten/kota.
12. Meningkatkan pengelolaan data dan menginformasikan kepada masyarakat dan mitra kerja mengenai potensi serta peranan pajak dan retribusi daerah maupun pendapatan lain-lain terhadap pembangunan daerah.
13. Mengoptimalkan kerja sama dan hubungan dengan masyarakat (community development) yang berkompeten dengan meningkatkan dan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah maupun pendapatan lain-lainnya.
14. Mewujudkan organisasi DPPKAD sebagai organisasi yang mau terus belajar (learning organization), beradaptasi dengan lingkungan, menerapkan teknik dan inovasi yang baru, dalam mewujudkan tujuan organisasi.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.2.1. TUJUAN

1. Terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme..
2. Tersedianya aparatur pemerintah daerah yang kompetitif,handal dan berkompetisi yang baik guna mendukung terwujudnya visi dan misi instansi.
3. Menjadikan DPPKAD sebagai pengendalian internal dibidang pendapatan,pengelolaan keuangan dan asset daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Mewujudkan instansi pemerintah dadrah yang dapat memberikan informasi dan solusi dalam peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemrintah daerah dalam bidang pendapatan,pengelolaan keuangan dan asset daerah.
5. Terwujudnya sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi,transparan dan akuntabel.

4.2.2. SASARAN

1. Mengurangi penyalahgunaan pengelolaan keuangan negara/daerah yang tidak efektif dan efisien.
2. Aparatur pemerintah daerah didalam instansi DPPKAD maupun di SKPD lainnya.
3. Laporan keuangan SKPD yang baik dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. memperkuat instansi DPPKAD sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5. Sistem informasi keuangan , pendapatan dan asset daerah yang baik dan benar yang dapat diyakini kebenarannya.

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.3.1. STRATEGI

Strategi yang dilaksanakan guna pencapaian Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dengan melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan melakukan langkah-langkah antara lain :

1. Mengoptimalkan sistem informasi pengelolaan keuangan sehingga dapat memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. memberikan kesempatan kepada aparatur untuk meningkatkan kompetensinya dibidang pajak, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana penunjang intensifikasi pemungutan pajak.
4. meningkatkan sinergi antar instansi pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD dalam tahun anggaran.

4.3.2. KEBIJAKAN

Arah Kebijakan yang dilaksanakan guna pencapaian Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang didasari tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah kebijakan-kebijakan yang dapat menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Guna mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menentukan beberapa Program dan Kegiatan berdasarkan skala prioritas, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif untuk Tahun 2012-2017, yaitu :

5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Dengan ditetapkan strategi pencapaian sasaran dan tujuan melalui penetapan kebijakan, maka DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan program dan kegiatan prioritas selama 5 tahun. Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Urusan wajib DPPKAD adalah urusan pemerintahan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

Penetapan program dan kegiatan disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan melalui strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan, maka program-program DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan dilaksanakan pada tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini merupakan program dalam mendukung aktivitas perkantoran DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya sarana dan prasarana aparatur di lingkungan DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan harapan akan memberi dampak/manfaat/hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini secara umum juga bertujuan untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang peningkatan kedisiplinan aparatur pada DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat menyediakan informasi keuangan.

6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Program ini merupakan program yang memprioritaskan untuk kegiatan pengevaluasian raperda kab/kota tentang APBD dan pertanggungjawaban realisasi APBD Kab/Kota.

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kinerja aparatur dalam bidang keuangan dan pendapatan.

8. Program Peningkatan Penerimaan Pajak

Pada program ini diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang dapat membangun kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, yang akan membuat pendapatan di bidang pajak daerah meningkat setiap tahunnya.

9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah

Program ini bertujuan untuk tersajinya informasi asset daerah yang diyakini dapat dipertanggungjawabkan.

5.2. KEGIATAN STRATEGIS

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Untuk melaksanakan program di atas, maka disusun kegiatan pada DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber-sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - f. Penyediaan alat tulis kantor
 - g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - j. Penyediaan makanan dan minuman
 - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - l. Penyediaan jasa penunjang dan pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran
 - m. Jasa pemeliharaan sistem pengganjian PNS SKPD di lingkungan Prov. Kep. Babel
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pembuatan DED dan Pembangunan Gedung
 - b. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
 - c. Pengadaan peralatan kantor
 - d. Pengadaan perlengkapan kantor
 - e. Pengadaan meubelair
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
 - h. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - i. Pemeliharaan rumah dinas
 - j. Pembangunan tempat cek fisik kendaraan bermotor
 - k. Pembangunan ruang arsip
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pembinaan Administrasi Umum, Kepegawaian dan keuangan di UPTD
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 - b. Rapat koordinasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

- c. Rakor Koordinasi PKB dan BBN KB dengan instansi terkait (kepolisian dan jasa raharja)
- d. Tim intensifikasi ekstensifikasi PBB dan PPh Prov.Kep.Babel
- e. Rapat Koordinasi PBB dan PPh
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan laporan keuangan semesteran
- 6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Penyusunan rancangan perda tentang APBD
 - b. Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
 - c. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
 - d. Operasional aplikasi SIPKD dan Regional SIKD
 - e. Pembinaan bendahara pengeluaran dan PPK-SKPD
 - f. Penyusunan dan Penghapusan barang-barang inventaris
 - g. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- 7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
 - a. Evaluasi raperda kab/kota tentang APBD dan perubahan APBD
 - b. Evaluasi raperda kab/kota dan peraturan bupati/walikota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- 8. Peningkatan penerimaan pajak
 - a. Sosialisasi perda pajak daerah
 - b. Razia kendaraan bermotor
- 9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah
 - a. Pembinaan bendahara barang dan pengurus barang SKPD

5.3. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan dari setiap program/kegiatan. Sedangkan untuk kelompok sasaran utama tersedianya sarana dan prasarana penunjang didalam melaksanakan Tugas DPPKAD dalam pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.

5.4. PENDANAAN PAGU INDIKATIF

Pendanaan untuk pelaksanaan dari setiap program/kegiatan merupakan pagu indikatif yang diperkirakan dibutuhkan untuk menjalankan setiap kegiatan untuk Tahun 2012-2017 dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran, dan Pendanaan Indikatorif
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				BELANJA LANGSUNG																	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		3.261.090.000,00	3.577.650.000,00	3.935.063.000,00	4.328.569.300,00	4.761.426.230,00	5.237.568.853,00										
kelancaran tugas rutin kantor	jasa pengiriman surat dan materai	% surat dan jasa pengiriman	1 20 05 01 0100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	aktivitas pelayanan pengiriman surat menyurat dan benda pos lainnya	212.000.000,00	benda pos dan paket 233.200.000,00	benda pos dan paket 256.520.000,00	benda pos dan paket 282.172.000,00	benda pos dan paket 310.389.200,00	benda pos dan paket 341.428.120,00	benda pos dan paket 375.570.930,00	sekretariat	pkp dan 7 updt kab/kota							
kelancaran tugas rutin kantor	jasa komunikasi dan penerangan kantor	tagihan listrik dan telpon	1 20 05 01 0200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kelancaran pelaksanaan tugas rutin	408.000.000,00	rekening listrik dan telepon 448.800.000,00	rekening listrik dan telepon 493.680.000,00	rekening listrik dan telepon 543.048.000,00	rekening listrik dan telepon 597.352.800,00	rekening listrik dan telepon 657.088.080,00	rekening listrik dan telepon 722.796.888,00	sekretariat	pkp dan 7 updt kab/kota							
kelancaran tugas rutin kantor	aparatur	tertibnya administrasi keuangan	1 20 05 01 0700	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	pengelolaan adm keuangan	202.200.000,00	honorarium 222.420.000,00	honorarium 244.662.000,00	honorarium 269.128.200,00	honorarium 296.041.020,00	honorarium 325.645.122,00	honorarium 358.209.634,00	sekretariat	pkp dan 7 updt kab/kota							
kelancaran tugas rutin kantor	aparatur dan alat kebersihan	honorarium cs dan ketrseediaan alat kebrsihan	1 20 05 01 0800	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	meningkatkan kualitas kerja aparatur DPPKAD	1.052.080.000,00	honorarium dan alat kebersihan 1.157.288.000,00	honorarium dan alat kebersihan 1.273.016.800,00	honorarium dan alat kebersihan 1.400.318.480,00	honorarium dan alat kebersihan 1.540.350.328,00	honorarium dan alat kebersihan 1.694.385.360,80	honorarium dan alat kebersihan 1.863.923.896,88	sekretariat	pkp dan 7 updt kab/kota							
kelancaran tugas rutin kantor	peralatan kerja	kondisi perlatan kerja	1 20 05 01 0900	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	terjaganya kondisi fasilitas kerja yg digunakan oleh aparatur	942.600.000,00	dana untuk perbaikan peralatan kerja 1.036.860.000,00	dana untuk perbaikan peralatan kerja 1.140.546.000,00	dana untuk perbaikan peralatan kerja 1.254.600.600,00	dana untuk perbaikan peralatan kerja 1.380.060.600,00	dana untuk perbaikan peralatan kerja 1.518.066.726,00	dana untuk perbaikan peralatan kerja 1.669.873.398,60	sekretariat	pkp dan 7 updt kab/kota							

peningkatan sarana dan prasarana	kinerja aparatur	spm	1	20	05	02	10906	Pengadaan Mesin Cetak TNKB Kantor Bersama Samsat	fasilitas kerja yg baik	390,594,350.00				0.00								
peningkatan sarana dan prasarana	aparatur	peningkatan kinerja aparatur	1	20	05	02	1000	Pengadaan Meubelair	fasilitas kerja yg baik	171,450,000.00				0.00								
terpeliharanya bangunan kantor	bangunan kantor	kondisi gedung kantor	1	20	05	02	2200	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	fasilitas kerja yg baik	849,800,000.00	kondisi gedung dan taman	934,780,000.00	kondisi gedung dan taman	1,028,258,000.00	kondisi gedung dan taman	1,028,258,000.00	kondisi gedung dan taman	1,028,258,000.00	kondisi gedung dan taman	1,028,258,000.00		
terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas/operasional	kondisi kendaraan dinas/operasional	1	20	05	02	2400	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	terpeliharanya kend.dinas/operasional kantor	882,150,000.00	kondisi kend.dinas/operasional	970,365,000.00	kondisi kend.dinas/operasional	1,067,401,500.00	kondisi kend.dinas/operasional	1,067,401,500.00	kondisi kend.dinas/operasional	1,067,401,500.00	kondisi kend.dinas/operasional	1,067,401,500.00		
terpeliharanya bangunan kantor	rumah dinas	kondisi rumah dinas					4100	Rehabilitasi rumah dinas pada UPTD/Samsat Kabupaten	terpeliharanya rumah dinas dengan baik		kondisi rumah dinas	195,804,200.00		0.00								
								Program Peningkatan Disiplin Aparatur		86,015,000.00	247,545,000.00		247,545,000.00	247,545,000.00	247,545,000.00	247,545,000.00	247,545,000.00	247,545,000.00	247,545,000.00			
administrasi umum, keuangan dan kepegawaian yang baik dan benar	7 uprd kab/kota	laporan-laporan yang baik dan benar	1	20	05	03	0800	Pembinaan Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan di UPTD	aktivitas adm perkantoran yg baik dan benar	86,015,000.00	SPPD dalam daerah	86,015,000.00	SPPD dalam daerah	86,015,000.00	SPPD dalam daerah	86,015,000.00	SPPD dalam daerah	86,015,000.00	SPPD dalam daerah	86,015,000.00		
peningkatan disiplin aparatur	aparatur	disiplin aparatur					0906	Pengadaan pakaian dinas	fasilitas pakaian dinas yang baik		pakaian dinas	161,530,000.00	pakaian dinas	161,530,000.00	pakaian dinas	161,530,000.00	pakaian dinas	161,530,000.00	pakaian dinas	161,530,000.00		
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		560,162,500.00	895,676,100.00		1,040,367,500.00	790,367,500.00	790,367,500.00	790,367,500.00	790,367,500.00	790,367,500.00	790,367,500.00			
peningkatan kompetensi aparatur	aparatur	kinerja aparatur	1	20	05	05	0300	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	peningkatan kualitas SDM	171,500,000.00	biaya kontribusi	449,900,000.00	biaya kontribusi	450,000,000.00	biaya kontribusi	450,000,000.00	biaya kontribusi	450,000,000.00	biaya kontribusi	450,000,000.00		
peningkatan penerimaan pendapatan daerah	aparatur	target pendapatan	1	20	05	05	2000	Rapat Koordinasi dan Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	target penerimaan	128,000,000.00	%pelaksanaan	106,978,600.00	%pelaksanaan	250,000,000.00								
peningkatan penerimaan pendapatan daerah	instansi terkait	target pendapatan	1	20	05	05	3300	Rakor Koordinasi PKB dan BBN KB dengan Instansi Terkait (Kepolisian dan Jasa Raharja)	target penerimaan	38,070,000.00	%pelaksanaan	93,630,000.00	%pelaksanaan	95,000,000.00	%pelaksanaan	95,000,000.00	%pelaksanaan	95,000,000.00	%pelaksanaan	95,000,000.00		

peningkatan penerimaan pendapatan daerah	dana bagi hasil	target pendapatan	1	20	05	05	3400	Tim Intensifikasi Ekstensifikasi PBB dan PPH Prov. Kep. Bangka Belitung	jumlah dana bagi hasil	80,000,000.00	%pelaksanaan	116,134,000.00	%pelaksanaan	116,134,000.00	%pelaksanaan	116,134,000.00	%pelaksanaan	116,134,000.00					
peningkatan penerimaan pendapatan daerah	dana bagi hasil	target pendapatan	1	20	05	05	3500	Rapat Koordinasi PBB dan PPH	jumlah dana bagi hasil	142,592,500.00	%pelaksanaan	129,233,500.00	%pelaksanaan	129,233,500.00	%pelaksanaan	129,233,500.00	%pelaksanaan	129,233,500.00					
								Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		60,113,900.00		64,291,500.00		64,291,500.00		64,291,500.00		64,291,500.00					
tersedianya laporan keuangan yang baik dan benar	skpd	laporan keuangan skpd	1	20	05	06	0200	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	tersedianya informasi tentang laporan keuangan	60,113,900.00	%pelaksanaan	64,291,500.00	%pelaksanaan	64,291,500.00	%pelaksanaan	64,291,500.00	%pelaksanaan	64,291,500.00					
								Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		3,902,030,900.00		3,049,575,200.00		3,283,559,077.00		2,683,559,077.00		2,683,559,077.00					
tersedianya perda APBD	perda APBD	jadwal penyusunan perda APBD	1	20	05	17	0600	Penyusunan Raperda Tentang APBD	tersedianya rancangan peraturan daerah tentang APBD	842,355,000.00	Perda	994,225,000.00	Perda	900,000,000.00	Perda	900,000,000.00	Perda	900,000,000.00	Perda	900,000,000.00			
tersedianya perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	perda pertanggungjawaban APBD	jadwal penyusunan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	20	05	17	1000	Penyusunan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	tersedianya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD	298,389,100.00	Perda	305,096,100.00	Perda	305,096,100.00	Perda	305,096,100.00	Perda	305,096,100.00	Perda	305,096,100.00			
penerimaan pajak daerah	wajib pajak	target penerimaan	1	20	05	17	1900	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	target penerimaan	436,857,500.00	%pelaksanaan	438,547,500.00	%pelaksanaan	438,547,500.00	%pelaksanaan	438,547,500.00	%pelaksanaan	438,547,500.00					
informasi nilai aset	skpd	neraca skpd	1	20	05	17	3100	Appraisal/Penilaian Aset dan Barang Daerah	tersedianya informasi tentang nilai aset yang akurat	836,087,100.00													
informasi keuangan daerah yang baik dan benar	skpd	laporan keuangan	1	20	05	17	3200	Operasional Aplikasi SIPKD dan Regional SIKD	operasional aplikasi SIPKD dan regional SIKD	428,632,000.00	37 skpd	425,000,000.00	37 skpd	500,000,000.00	37 skpd	500,000,000.00	37 skpd	500,000,000.00	37 skpd	500,000,000.00			
peningkatan kompetensi PPK dan Bendaharawan	PPK SKPD dan Bendaharawan	laporan keuangan SKPD	1	20	05	17	3300	Pembinaan Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD	peningkatan kinerja aparatur	171,410,000.00	bend.pengeluaran dan PPK SKPD	201,310,800.00	bend.pengeluaran dan PPK SKPD	201,310,800.00	bend.pengeluaran dan PPK SKPD	201,310,800.00	bend.pengeluaran dan PPK SKPD	201,310,800.00	bend.pengeluaran dan PPK SKPD	201,310,800.00			
tersedianya panduan standart harga satuan barang dan jasa di wil.prov.kep.babel	buku HSBJ	buku	1	20	05	17	3400	Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa (HSBJ) Prov. Kep. Bangka Belitung	tersedianya informasi tentang harga satuan barang dan jasa	130,995,100.00	jumlah buku	125,305,100.00	jumlah buku	124,841,151.00	jumlah buku	124,841,151.00	jumlah buku	124,841,151.00	jumlah buku	124,841,151.00			

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DPPKAD

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis Tahun 2012-2017 yaitu :

6.1. TUJUAN

1. Terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme..
2. Meningkatkan penerimaan pajak asli daerah
3. Meningkatkan fungsi dan peranan serta kinerja aparatur DPPKAD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah..
4. Menjadikan DPPKAD sebagai sarana pengendalian internal di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.

6.2. SASARAN

1. Mengurangi penyalahgunaan pengelolaan keuangan negara/daerah yang tidak efektif dan efisien.
2. Tercapainya target penerimaan pajak asli daerah
2. Adanya kepercayaan masyarakat kepada aparatur DPPKAD didalam menjalankan fungsinya dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
3. Menciptakan sistem informasi dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah yang komprehensif, akurat, reliable, dan transparan.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang mengacu
pada Tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2012	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	31 Desember 2011	≤ 31 desember 2012	≤ 31 desember 2013	≤ 31 desember 2014	≤ 31 desember 2015	≤ 31 desember 2016	Tepat Waktu
2	Penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	≤ 31 juli 2013	≤ 31 juli 2014	≤ 31 juli 2015	≤ 31 juli 2016	≤ 31 juli 2017	≤ 31 juli 2018	Tepat Waktu
3	Pajak Daerah							
	- PKB	117,889,274,853.00	128,058,922,607.57	140,302,963,402.25	152,547,004,196.93	164,791,044,991.61	177,035,085,786.29	over target
	- BBN-KB	130,254,899,475.00	131,875,828,841.37	135,832,103,706.61	139,907,066,817.81	144,104,278,822.35	148,427,407,187.02	over target
	- PAP	3,955,612,484.04	3,309,553,715.43	3,565,208,926.32	3,820,864,137.22	4,076,519,348.11	4,332,174,559.00	over target
	- PBB KB	118,514,075,055.00	123,319,676,689.00	129,485,660,523.45	135,959,943,549.62	142,757,940,727.10	149,895,837,763.46	over target

BAB VII

PENUTUP

Rencana strategis (renstra) DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2010-2015 merupakan suatu rencana yang ingin dicapai oleh DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Renstra ini disusun dengan memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan potensi yang ada di DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara khusus dan secara umum kondisi, situasi dan potensi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyusunan rencana strategis ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017. Hasil pelaksanaan dari renstra DPPKAD tahun 2012-2017 akan menjadi tolok ukur keberhasilan DPPKAD dalam pencapaian sasaran yang diinginkan. Tolok ukur ini akan terlihat dari laporan kinerja yang disampaikan pada setiap akhir tahun anggaran melalui penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan baik pada tingkat *output*, *outcome* maupun pada tingkat *benefit*.

Rencana strategis DPPKAD ini pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan perencanaan program jangka menengah periode 2010-2015 dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017. Oleh karena itu diharapkan renstra DPPKAD ini dapat dijalankan sesuai dengan rencana dengan didukung oleh seluruh Sumber Daya Aparatur DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umum.